

**[SIARAN PERS]**

Nomor: 045/RILIS/BKN/X/2020

**Akselerasi *Talent Database* Nasional, BKN Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi**

Salah satu tugas yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah. Dari aspek penilaian kompetensi, BKN sudah melaksanakan *talent pool* dalam rangka pengisian dalam jabatan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas. Penilaian kompetensi yang sebelumnya masih menasar sejumlah kelompok jabatan menjadi awal penyusunan *talent database* nasional yang akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola BKN sebagai profil PNS.

Penyusunan *talent database* sebagai salah satu bagian dari profil PNS memerlukan kerja sama dari seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu BKN menggulirkan program penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) untuk melakukan standarisasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) di lingkup Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). BKN melakukan standarisasi melalui akreditasi untuk menjamin kualitas hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi berjalan akuntabel dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penilaian kompetensi.

BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom ASN) merilis data (sampai dengan September 2020) bahwa Instansi Pusat dan Daerah yang telah memiliki Penyelenggara Penilaian Kompetensi berjumlah 52 (lima puluh dua) Instansi, yang dinilai berdasarkan tersedianya Asesor SDM Aparatur di lingkungan instansinya dan telah menyelenggarakan penilaian kompetensi. Dari jumlah tersebut, BKN sudah memberikan akreditasi kepada 6 (enam) Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada tahun 2019. Sementara untuk tahun 2020, BKN sudah melakukan penilaian dan pengakuan kelayakan terhadap 9 (sembilan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penilaian dan pengakuan kelayakan Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah tahun 2020 diserahkan

secara langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana pada Senin 19 Oktober 2020. Selain itu direncanakan tahun 2021, BKN akan melakukan penilaian dan pengakuan kelayakan bagi 25 penyelenggara.

Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah yang sudah diakreditasi akan bekerja sama dengan BKN untuk melakukan akselerasi penyusunan *talent database* nasional dengan mekanisme sebagai berikut: Penyelenggara yang terakreditasi A dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan jenjang JPT Pratama atau jabatan fungsional yang setara, sedangkan Penyelenggara yang terakreditasi B dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan jenjang Administrator atau jabatan fungsional yang setara ; Penyelenggara lain diharapkan melakukan penilaian kompetensi minimal di lingkungan instansinya atau dapat memfasilitasi di luar instansi atau wilayahnya; Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah ikut melaksanakan program *talent pool* mengikuti standar asesor, metode, alat ukur, laporan, standar nilai, dan pelaksanaan yang ditetapkan BKN; dan hasil penilaian kompetensi yang dilakukan diinput dalam *talent database* di BKN.

Selain itu BKN juga mendorong agar penilaian kompetensi dilakukan dengan teknologi informasi untuk menghindari pertemuan fisik, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu sudah dilakukan BKN dengan metode *Assessment Online* mulai Mei 2020. BKN mendorong agar nantinya seluruh Instansi Pemerintah membangun infrastruktur *Assessment Center* yang mendapat penilaian dan pengakuan kelayakan, sehingga dapat bekerja sama dengan BKN mempercepat penyusunan *talent database* nasional.

§